



## Etika Kristen Terhadap Politik Kekuasaan di Indonesia: Kajian Teologi Publik Atas Krisis Integritas Demokrasi

Sabar Rudi Sitompul<sup>1</sup>, Dedy Syahputra Situmorang<sup>2</sup>, Cyndi Grenata Riaminta Sinaga<sup>3</sup>,  
Kristin Evelin Ritonga<sup>4</sup>, Windi Efrilina Siregar<sup>5</sup>, Anasthasya Rita T. Manurung<sup>6</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Institut Agama Kristen Negeri Tarutung  
E-mail: [sabarrudi2021@gmail.com](mailto:sabarrudi2021@gmail.com)<sup>1</sup>, [dedesyahputrasitumorang99@gmail.com](mailto:dedesyahputrasitumorang99@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[cyndisinaga1@gmail.com](mailto:cyndisinaga1@gmail.com)<sup>3</sup>, [kristinritonga3@gmail.com](mailto:kristinritonga3@gmail.com)<sup>4</sup>, [windisiregar06@gmail.com](mailto:windisiregar06@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[manurunganathasya@gmail.com](mailto:manurunganathasya@gmail.com)<sup>6</sup>

---

### Article Info

#### Article history:

Received April 28, 2026

Revised April 30, 2026

Accepted May 02, 2026

#### Keywords:

*Political Ethics, Public Theology, Democracy, Integrity, Power*

---

### ABSTRACT

*This study aims to examine the crisis of democratic integrity in Indonesia through a political ethics and public theology approach. This study highlights the gap between ongoing democratic procedures and the degradation of ethical values in the practice of power, evident in the strengthening of oligarchy, corruption, and political pragmatism. This study uses qualitative methods with descriptive-analytical and hermeneutic-critical library research, through a review of literature from the fields of Political Science, Ethics, and theology. The results indicate that the crisis of democracy in Indonesia is not only institutional but also reflects a serious moral crisis in the exercise of power, where power often loses its orientation toward the public interest. From a political ethics perspective, this condition indicates a weakening of moral responsibility in the practice of power, while a public theology approach offers a normative framework that positions religious values as the basis for critique and reconstruction of the politics of power. The integration of political ethics and public theology allows for the reformulation of integrity as the primary foundation of democracy, not only procedural but also substantive. Therefore, efforts to reconstruct ethics are needed through strengthening moral awareness, optimizing the critical role of religion in the public sphere, and committing to transparent and accountable governance to realize a more just and inclusive Indonesian democracy.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

### Article Info

#### Article history:

Received April 28, 2026

Revised April 30, 2026

Accepted May 02, 2026

---

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji krisis integritas demokrasi di Indonesia melalui pendekatan etika politik dan Teologi Publik dengan menyoroti kesenjangan antara prosedur demokrasi yang tetap berjalan dan degradasi nilai etis dalam praktik kekuasaan, yang tampak dalam menguatnya oligarki, korupsi, dan pragmatisme politik. Penelitian ini

**Kata Kunci:**

Etika Politik, Teologi Publik,  
Demokrasi, Integritas

menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis dan hermeneutik-kritis, melalui kajian literatur dari bidang Ilmu Politik, Etika, dan teologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis demokrasi di Indonesia tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga mencerminkan krisis moral yang serius dalam penyelenggaraan kekuasaan, di mana kekuasaan sering kali kehilangan orientasi pada kebaikan bersama. Dalam perspektif etika politik, kondisi ini menunjukkan melemahnya tanggung jawab moral dalam praktik kekuasaan, sementara pendekatan teologi publik menawarkan kerangka normatif yang menempatkan nilai-nilai religius sebagai dasar kritik sekaligus rekonstruksi terhadap politik kekuasaan. Integrasi antara etika politik dan teologi publik memungkinkan perumusan kembali integritas sebagai fondasi utama demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi etika melalui penguatan kesadaran moral, optimalisasi peran agama di ruang publik secara kritis, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel guna mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih berkeadilan dan berintegritas.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

**Corresponding Author:**

Sabar Rudi Sitompul  
Institut Agama Kristen Negeri Tarutung  
E-mail: [sabarrudi2021@gmail.com](mailto:sabarrudi2021@gmail.com)

**PENDAHULUAN**

Demokrasi Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan paradoks yang semakin nyata: di satu sisi, prosedur demokratis seperti pemilihan umum dan kebebasan sipil tetap berjalan; namun di sisi lain, kualitas etis dari praktik politik justru mengalami degradasi serius. Fenomena seperti korupsi struktural, politik dinasti, pragmatisme kekuasaan, dan lemahnya akuntabilitas publik memperlihatkan bahwa demokrasi tidak lagi sepenuhnya berakar pada nilai integritas, melainkan cenderung menjadi arena kontestasi kepentingan sempit elite politik. Dalam konteks ini, etika politik menjadi krusial sebagai fondasi normatif yang mengarahkan praktik kekuasaan pada tujuan kebaikan bersama (*bonum commune*), bukan sekadar legitimasi formal kekuasaan itu sendiri.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa krisis demokrasi di Indonesia bukan semata-mata persoalan institusional, melainkan juga krisis moral dan integritas. Etika politik yang seharusnya berfungsi sebagai pedoman perilaku pejabat publik sering kali tereduksi menjadi retorika normatif tanpa implementasi nyata. Padahal, dalam kerangka nilai dasar negara, Pancasila mengandung prinsip-prinsip etis yang menuntut penyelenggaraan kekuasaan secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Ketidaksesuaian antara nilai normatif dan praktik politik ini menandakan adanya jarak serius antara idealitas demokrasi dan realitas politik kekuasaan di Indonesia.



Dalam situasi demikian, pendekatan etika politik konvensional belum sepenuhnya memadai untuk menjawab kompleksitas krisis yang terjadi. Diperlukan pendekatan yang lebih reflektif dan transformatif, salah satunya melalui perspektif teologi publik. Teologi publik tidak sekadar membawa agama ke ruang privat, melainkan menghadirkan nilai-nilai moral religius ke dalam ruang publik secara kritis dan dialogis. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi etis terhadap praktik kekuasaan dengan menekankan dimensi tanggung jawab moral, keadilan sosial, serta integritas sebagai panggilan etik yang melampaui kepentingan politik pragmatis. Dalam kerangka ini, agama tidak berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan, melainkan sebagai sumber kritik profetik terhadap penyimpangan politik.

Dengan demikian, tulisan ini berupaya mengkaji bagaimana etika terhadap politik kekuasaan di Indonesia dapat direkonstruksi melalui perspektif teologi publik, khususnya dalam merespons krisis integritas demokrasi yang semakin menguat. Kajian ini penting tidak hanya untuk memperkaya diskursus akademik yang bersifat interdisipliner antara etika, politik, dan teologi, tetapi juga untuk menawarkan kerangka normatif yang lebih substantif dalam membangun kembali integritas demokrasi di Indonesia.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berorientasi pada analisis normatif-kritis. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian tidak berfokus pada pengukuran empiris, melainkan pada eksplorasi konsep, nilai, dan refleksi etis terhadap praktik politik kekuasaan di Indonesia dalam perspektif Teologi Publik. Sumber data utama terdiri atas karya-karya ilmiah berupa buku dan artikel jurnal dari pemikir Indonesia di bidang Etika, Ilmu Politik, dan teologi, termasuk pemikiran Franz Magnis-Suseno serta literatur tentang Pancasila sebagai sistem etika publik. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen sekunder seperti laporan akademik, hasil penelitian terdahulu, serta analisis kritis terhadap fenomena kontemporer seperti korupsi politik, oligarki, dan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun digital yang dapat diakses secara akademik.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan hermeneutik-kritis. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis konsep etika politik dan dinamika krisis integritas demokrasi, sedangkan analisis hermeneutik digunakan untuk menafsirkan makna normatif dari teks-teks teologis dan filosofis dalam konteks realitas politik Indonesia. Selanjutnya, pendekatan kritis digunakan untuk mengevaluasi praktik kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dikembangkan dalam teologi publik, sehingga menghasilkan sintesis konseptual yang tidak hanya bersifat interpretatif, tetapi juga normatif-transformatif. Dengan demikian, metodologi ini memungkinkan peneliti untuk mengkonstruksi kerangka etika politik berbasis teologi publik yang relevan dalam merespons krisis integritas demokrasi, sekaligus menawarkan refleksi kritis terhadap hubungan antara agama, moralitas, dan kekuasaan dalam ruang publik Indonesia.



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Krisis Integritas dalam Praktik Politik Kekuasaan**

Demokrasi Indonesia menunjukkan gejala krisis integritas yang tampak dalam menguatnya oligarki, politik dinasti, serta praktik korupsi yang melibatkan elite kekuasaan. Dalam perspektif Ilmu Politik, kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara legitimasi prosedural dan legitimasi moral. Artinya, meskipun mekanisme demokrasi seperti pemilu tetap berjalan, substansi demokrasi sebagai sistem yang menjunjung nilai keadilan dan akuntabilitas justru mengalami kemunduran. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa struktur kekuasaan di Indonesia pasca-reformasi masih didominasi oleh jejaring elite yang mempertahankan kepentingannya melalui kontrol politik dan ekonomi, sehingga mempersempit ruang partisipasi publik yang autentik.

### **2. Etika Politik Sebagai Fondasi yang Terdegrasi**

Dalam kerangka Etika, kekuasaan politik seharusnya dijalankan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan bersama, bukan sebagai alat dominasi. Pemikiran Franz Magnis-Suseno menegaskan bahwa etika politik menuntut tanggung jawab moral dalam setiap tindakan kekuasaan, terutama dalam konteks demokrasi yang berbasis kepercayaan publik. Namun, realitas politik Indonesia menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari etika ke pragmatisme, di mana keberhasilan politik lebih diukur dari efektivitas mempertahankan kekuasaan dibandingkan komitmen terhadap nilai moral. Hal ini menyebabkan melemahnya integritas sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara dan mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi atau kelompok.

### **3. Teologi Publik sebagai Kritik dan Rekonstruksi Etis**

Pendekatan Teologi Publik menawarkan kerangka refleksi yang mampu mengintegrasikan dimensi moral religius ke dalam analisis politik tanpa terjebak dalam formalisme keagamaan. Dalam pandangan Eka Darmaputera, agama memiliki fungsi profetis yang kritis terhadap kekuasaan, yakni menegur dan mengoreksi praktik politik yang menyimpang dari nilai keadilan dan kemanusiaan.<sup>3</sup> Dengan demikian, teologi publik dapat berperan sebagai sumber etika transformatif yang tidak hanya mengkritik krisis integritas demokrasi, tetapi juga menawarkan orientasi baru bagi praktik kekuasaan yang lebih berakar pada nilai tanggung jawab, keadilan sosial, dan keberpihakan pada kepentingan umum.

Krisis integritas demokrasi di Indonesia dalam praktiknya memperlihatkan kecenderungan pergeseran dari demokrasi substantif menuju demokrasi prosedural yang dangkal. Fenomena seperti menguatnya oligarki politik, maraknya korupsi di kalangan elite, serta praktik politik dinasti menunjukkan bahwa kekuasaan tidak lagi sepenuhnya dijalankan dalam kerangka etis yang berorientasi pada kepentingan publik, melainkan cenderung dikendalikan oleh relasi kuasa dan kepentingan ekonomi-politik tertentu. Dalam kerangka Ilmu Politik, kondisi ini menandakan terjadinya distorsi dalam relasi antara kekuasaan dan legitimasi, di mana legitimasi formal melalui pemilu tidak selalu berbanding lurus dengan legitimasi moral. Hal ini sejalan dengan kritik bahwa demokrasi Indonesia mengalami “defisit etika”, yaitu melemahnya komitmen terhadap nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam praktik politik sehari-hari.<sup>1</sup>



Dalam perspektif Etika, kekuasaan seharusnya tidak dipahami sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan bersama. Pemikiran Franz Magnis-Suseno menekankan bahwa etika politik mengandaikan adanya tanggung jawab moral yang melekat pada setiap penggunaan kekuasaan, terutama dalam konteks negara demokratis yang bertumpu pada kepercayaan publik.<sup>2</sup> Namun, dalam realitas Indonesia, orientasi tersebut sering kali tergeser oleh pragmatisme politik, di mana keberhasilan diukur dari kemampuan mempertahankan kekuasaan, bukan dari integritas moral dalam menjalankannya. Akibatnya, ruang publik kehilangan dimensi etisnya dan berubah menjadi arena kompetisi tanpa batas yang rentan terhadap manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Di sinilah pendekatan Teologi Publik menjadi relevan sebagai kerangka refleksi kritis sekaligus normatif. Teologi publik menempatkan nilai-nilai religius seperti keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab sebagai basis evaluasi terhadap praktik politik, tanpa jatuh pada formalisme agama dalam negara. Dalam tradisi teologi Indonesia, sebagaimana dikembangkan oleh pemikir seperti Eka Darmaputera, agama memiliki fungsi profetis, yaitu mengkritik kekuasaan yang menyimpang dan mengingatkan pada panggilan moral untuk membela kepentingan masyarakat luas.<sup>3</sup> Dengan demikian, teologi publik tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi normatif, tetapi juga sebagai kekuatan korektif terhadap penyimpangan etika dalam politik kekuasaan.

Lebih jauh, sintesis antara etika politik dan teologi publik memungkinkan perumusan kembali integritas sebagai kategori kunci dalam demokrasi. Integritas tidak sekadar dimaknai sebagai kejujuran individual, melainkan sebagai kesatuan antara nilai, tindakan, dan tanggung jawab publik dalam penyelenggaraan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab sebagai dasar etis kehidupan bernegara. Oleh karena itu, rekonstruksi etika politik melalui pendekatan teologi publik tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam membangun budaya politik yang lebih berintegritas, di mana kekuasaan dijalankan sebagai amanah moral, bukan sekadar instrumen dominasi.

## **SIMPULAN**

Kajian ini menunjukkan bahwa krisis integritas demokrasi di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan institusional, melainkan berakar kuat pada degradasi etika dalam praktik politik kekuasaan. Demokrasi yang secara prosedural tetap berjalan ternyata belum mampu menjamin hadirnya keadilan, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan publik. Dalam perspektif Ilmu Politik, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara legitimasi formal dan legitimasi moral, di mana kekuasaan sering kali dijalankan tanpa dasar tanggung jawab etis yang memadai.

Lebih lanjut, analisis dalam kerangka Etika menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan yang kehilangan dimensi moral akan cenderung terjebak dalam pragmatisme politik dan kepentingan sempit. Pemikiran Franz Magnis-Suseno menekankan pentingnya tanggung jawab moral sebagai inti dari etika politik, namun dalam realitas Indonesia, prinsip tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik kekuasaan. Akibatnya, integritas sebagai fondasi demokrasi mengalami erosi yang signifikan.



Dalam konteks tersebut, pendekatan Teologi Publik memberikan kontribusi penting sebagai kerangka refleksi kritis dan normatif. Teologi publik menghadirkan nilai-nilai moral religius sebagai basis evaluasi sekaligus koreksi terhadap praktik politik yang menyimpang. Dengan fungsi profetisnya, sebagaimana ditekankan oleh Eka Darmaputera, teologi publik tidak hanya mengkritik, tetapi juga mendorong rekonstruksi etika politik yang lebih berorientasi pada keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, integrasi antara etika politik dan teologi publik menjadi penting dalam upaya memperkuat kembali integritas demokrasi di Indonesia.

## REKOMENDASI

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya sistematis untuk merekonstruksi etika dalam politik kekuasaan di Indonesia. Pertama, penguatan pendidikan etika politik perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik dalam ranah formal maupun non-formal, dengan menekankan internalisasi nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sebagai bagian integral dari budaya politik. Hal ini penting agar demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme prosedural, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Kedua, aktor-aktor keagamaan dan institusi keagamaan perlu mengoptimalkan peran Teologi Publik sebagai kekuatan moral di ruang publik. Peran ini tidak bersifat politis-pragmatis, melainkan etis-kritis, yaitu memberikan suara profetis terhadap praktik kekuasaan yang menyimpang serta mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Dengan demikian, agama tidak menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi menjadi sumber nilai yang menjaga arah moral demokrasi.

Ketiga, perlu adanya komitmen yang lebih kuat dari para penyelenggara negara untuk menjadikan integritas sebagai prinsip utama dalam menjalankan kekuasaan. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan sistem akuntabilitas, transparansi, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten. Dalam hal ini, nilai-nilai etika yang bersumber dari refleksi filosofis dan teologis perlu diintegrasikan ke dalam praktik kebijakan publik secara nyata, sehingga tercipta sinergi antara norma moral dan tindakan politik.

Dengan demikian, rekonstruksi etika politik melalui pendekatan teologi publik tidak hanya menjadi wacana akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam membangun demokrasi Indonesia yang lebih berintegritas, adil, dan berorientasi pada kebaikan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Febriany, Farah Sabilla, dan Dinie Anggraeni Dewi. "Nilai-Nilai Pancasila dan Dinamika Etika Politik Indonesia." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 2 No. 4, 2021.
- Naitili, Kornelius, dan Benigno Nainggolan. "Etika Politik Menurut Franz Magnis-Suseno." *Seminar Nasional Filsafat Teologi*, 2024.
- Naitili, Kornelius, dan Benigno Nainggolan. "Etika Politik Menurut Franz Magnis-Suseno." *Seminar Nasional Filsafat Teologi*, 2024.
- Malik, Adam, Abdur Rahim, dan Taufiqurachman. "Urgensi Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun dalam Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6 No. 5, 2023.



- Kristiyanto, Eddy (ed.). *Etika Politik dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Hadiz, Vedi R., dan Richard Robison. "The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia." *Indonesia Journal*, 2013.
- Assyaukanie, Luthfi. "Demokrasi, Agama, dan Ruang Publik di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Islam*, 2011.
- Darmaputera Eka, *Pancasila: Identitas dan Modernitas*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988.
- Vedi R. Hadiz, *Oligarki dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2017.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas, 2003.